

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran. Audit yang merupakan salah satu bagian dari pengawasan, pada praktisnya terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu instansi yang diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan (Samsi, 2013).

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad governance*) dan buruknya birokrasi.

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang

dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan untuk mewujudkan *good governance* pada sektor publik antara lain meliputi penetapan standar etika dan perilaku aparatur pemerintah, penetapan struktur organisasi dan proses pengorganisasian yang secara jelas mengatur tentang peran dan tanggung jawab serta akuntabilitas organisasi kepada publik, pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai, dan pelaporan eksternal yang disusun berdasarkan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik saat ini adalah semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejala yang berakar pada ketidakpuasan dimana tuntutan semakin tinggi diajukan terhadap pertanggung jawaban yang diberikan oleh penyelenggara

negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat adanya efektivitas tata kelola (*effective governance*) pemerintahan.

Pengawasan hakekatnya adalah suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah dan memiliki kendala, terutama dibidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka menjawab penilaian kinerja atas tuntutan pelaksanaan akuntabilitas organisasi sektor publik terhadap terwujudnya *good governance*. Pengawasan berfungsi membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, serta berperan dalam mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran.

Kualitas hasil pemeriksaan merupakan indikator penilaian terhadap pengawasan yang telah dilakukan oleh aparat pemeriksa. Hasil pemeriksaan yang mempunyai kualitas baik diharapkan mampu memberikan jaminan terhadap tata kelola pemerintahan yang transparansi dan bertanggung jawab.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pemeriksa untuk memberikan rekomendasi sebagai bahan perbaikan akuntabilitas untuk dapat ditindaklanjuti. Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat penting sebagai fungsi pengawasan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) (Astrawan, 2016).

Kualitas hasil pemeriksaan yang baik dapat dicapai apabila seorang pemeriksa memiliki kompetensi, pengalaman kerja dan independensi yang cukup baik pula. Fenomena kualitas hasil pemeriksaan tidak serta merta hanya dipengaruhi oleh faktor di atas, namun tergantung juga dengan adanya faktor kontinjensi, satu diantaranya adalah etika pemeriksa dapat memberikan dampak pencapaian tingkat kualitas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Orang yang berkompeten adalah orang dengan keterampilan mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Untuk dapat memiliki keterampilan, seorang auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pencapaian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dan praktek audit. Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dibidang praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi juga harus menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan independensinya diragukan masyarakat. Sikap

mental independen auditor menurut masyarakat inilah yang tidak mudah diperoleh olehnya. Kompetensi, pengalaman kerja dan independensi yang dimiliki auditor dalam penerapannya akan terkait dengan etika. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri dimana akuntan mempunyai tanggungjawab menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas mereka.

Pengalaman bagi auditor dalam bidang audit berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keahlian diperoleh auditor dari pendidikan formalnya sehingga kualitas audit akan semakin baik seiring bertambahnya pengalaman (Wiratama dan Budiarta, 2015). Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan (Samsi, 2013).

Inspektorat kabupaten/kota merupakan suatu lembaga pengawas dilingkungan pemerintah daerah. Inspektorat Daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Inspektorat Daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan dapat berjalan secara maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari Inspektorat Daerah demi optimalisasi tugas serta tanggungjawab. Kinerja dari Inspektorat Daerah sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu penyebab terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tentunya berdampak pada pemborosan anggaran dan keuangan daerah. Disamping itu, akibat lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada sebagian oknum di lingkungan pemerintahan daerah yang tidak atau belum siap dengan berlakunya otonomi daerah, terutama berkaitan dengan masalah etika dan moral dari oknum pejabat pemerintahan daerah tersebut yang rendah (Febriansyah, 2014).

Inspektorat merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah, baik untuk tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang

bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus di sikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tataran eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance* dan *clean government*.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan untuk mewujudkan *good governance* pada sektor publik antara lain meliputi penetapan standar etika dan perilaku aparatur pemerintah, penetapan struktur organisasi dan proses pengorganisasian yang secara jelas mengatur tentang peran dan tanggung jawab serta akuntabilitas organisasi kepada publik, pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai, dan pelaporan eksternal yang disusun berdasarkan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Febriansyah, 2014).

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai hubungan kompetensi, independensi dan pengalaman kerja dengan kualitas audit. Kharisma (2012) dan Deli (2015) meneliti bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian mengenai independensi dilakukan oleh Ayuningtyas dan Pamudji (2012) menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Demikian juga Khadafi (2014) menemukan bahwa variabel independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Begitu juga dengan variabel pengalaman kerja, Samsi (2013) menemukan bahwa variabel pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dan menurut Deli (2015) menunjukkan bahwa variabel pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hubungan antara kompetensi, independensi dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Beberapa faktor mengganggu menyebabkan timbulnya perbedaan hasil penelitian. Peneliti menggunakan waktu atau tahun yang berbeda pada masing-masing penelitiannya. Populasi sampel dan Inspektorat yang digunakan pada beberapa peneliti juga berbeda. Dari beberapa faktor yang mengganggu pada penelitian ini, maka muncul faktor kontijensi. Faktor kontijensi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori kontijensi. Pada penelitian ini faktor kontijensi dijelaskan dengan menggunakan salah satu variabel yang terdapat pada teori kontijensi yaitu dengan menggunakan variabel moderating. Variabel moderating memungkinkan adanya variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan Kompetensi, Independensi dan Pengalaman kerja terhadap kualitas audit.

Sikap-sikap yang dimiliki auditor dalam penerapannya akan berkaitan dengan etika. Pedoman etika ini mengatur perilaku auditor dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota seprofesi maupun masyarakat umum. Dengan adanya seperangkat pedoman atau aturan ini sebagai standar etis tertinggi auditor, masyarakat atau pengguna laporan keuangan dapat menilai sejauh mana auditor bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah ditetapkan.

Etika pada dasarnya berkaitan erat dengan moral yang merupakan kristalisasi dari ajaran-ajaran, patokan-patokan, kumpulan aturan dan

ketetapan baik lisan maupun tertulis. Auditor dalam menjalankan praktik profesinya harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku auditor (Queena dan Rohman, 2012).

Etika dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral yang dimiliki oleh setiap orang. Lestari (2012) dalam Kurnia (2014) mengemukakan bahwa etika sebagai seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau masyarakat atau profesi. Menurut Halim (2008:29) dalam Kurnia (2014) salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap kode etik, yang terefleksikan oleh sikap independensi, obyektivitas, integritas dan lain sebagainya. Kode etik IAI yang ditetapkan dalam Kongres VII Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta tahun 1998 terdiri atas (a) prinsip etika, (b) aturan etika, dan (c) interpretasi aturan etika. Kode etik akuntan terdapat delapan prinsip etika sebagai berikut: (1) tanggung jawab profesi, (2) kepentingan publik, (3) integritas, (4) obyektivitas, (5) kompetensi dan kehati-hatian professional, (6) kerahasiaan, (7) perilaku professional, dan (8) standar teknis (Halim : 2008) dalam Kurnia (2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Kharismatuti dan Hadiprajitno (2012) mengenai Etika Auditor Sebagai variabel moderating pada auditor internal di BPKP DKI Jakarta yang berstatus sebagai auditor yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai auditor, hasil penelitian tersebut perubahan

etika auditor memoderasi hubungan antara kompetensi dan independensi dengan kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti kini menganalisis etika auditor sebagai variabel moderating yang memperkuat dan memperlemah hubungan antara Kompetensi, Independensi dan Pengalaman kerjaterhadap kualitas audit.

Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dari Queena dan Rohma (2012) tentang Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit aparat inspektorat kota/kabupaten di Jawa Tengah. Perbedaan pada penelitian ini dengan sebelumnya adalah menambah etika auditor sebagai variabel moderating. Peneliti akan meneliti tentang kualitas audit, maka variabel independen yang dipilih yaitu Kompetensi, Independensi dan Pengalaman kerja. Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2012. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2016. Kemudian perbedaan antara penelitian ini dengan sebelumnya adalah populasi dan sampel yang digunakan penelitian ini meneliti pada Inspektorat kota Surakarta, kabupaten Karanganyar dan kabupaten Boyolali dengan cara menggunakan kuesioner yang disebar oleh peneliti dan diisi oleh responden (auditor) sebagai bahan untuk dilakukannya pengujian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN ETIKA AUDITOR SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Empiris pada Inspektorat Kabupaten/Kota Surakarta, Karanganyar dan

Boyolali)". Dalam penelitian ini menggunakan variabel etika audit sebagai variabel moderasi karena auditor yang memiliki etika tinggi akan mempertahankan kualitas diri, sehingga secara tidak langsung hasil kinerjanya juga akan berkualitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
5. Apakah etika auditor memoderasi hubungan antara kompetensi dengan kualitas audit?
6. Apakah etika auditor memoderasi hubungan antara independensi dengan kualitas audit?
7. Apakah etika auditor memoderasi hubungan antara pengalaman kerja dengan kualitas audit?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.

2. Menguji dan menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit.
5. Menguji dan menganalisis hubungan etika auditor dalam memoderasi hubungan antara kompetensi dengan kualitas audit.
6. Menguji dan menganalisis hubungan etika auditor dalam memoderasi hubungan antara independensi dengan kualitas audit.
7. Menguji dan menganalisis hubungan etika auditor dalam memoderasi hubungan antara pengalaman kerja dengan kualitas audit.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Penulis

Mampu menambah pengetahuan di bidang auditing khususnya pemahaman mengenai kompetensi, independensi dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderating.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Inspektorat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Inspektorat khususnya bagi para auditor untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi, independensi dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderating sehingga kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor semakin meningkat.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang berurutan, terdiri dari beberapa bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian yang akan dibahas, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang merupakan gambaran yang menyeluruh dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan erat dengan topik bahasan tugas yang sedang disusun. Teori-teori tersebut dapat dikategorikan dalam topik bahasan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi variabel penelitian yang digunakan, penentuan sampel dan populasi data yang akan digunakan. Selain itu bab ini juga berisi jenis dan sumber data, metode pengumpulan data yang digunakan, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan isi pokok keseluruhan penelitian ini. Bab ini menyajikan hasil pengolahan data disertai dengan pembahasan atas hasil pengolahan tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan uraian-uraian singkat dan jelas pada hasil pembahasan bab 4 yang menunjukkan hasil penelitian. Saran ditujukan untuk pihak yang diperkirakan dapat memetik manfaat dari hasil penelitian ini. Selain itu, dapat juga mengemukakan sesuatu yang menarik yang perlu dilakukan sebagai kelanjutan dari hasil penelitian, jika mungkin dengan beberapa alternatif pemecahannya.